

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI**

#### **2.1 Sejarah Perusahaan**

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pembentukan Diskominfo Tangsel tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom pada 26 November 2008, berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Awalnya, urusan komunikasi dan informatika di Kota Tangerang Selatan berada di bawah naungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan akan pengelolaan informasi dan teknologi yang lebih spesifik, dilakukan pemisahan tugas dan fungsi. Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya, untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan birokrasi yang lebih efisien, dilakukan penyederhanaan struktur organisasi. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 56 Tahun 2022, yang menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang baru.



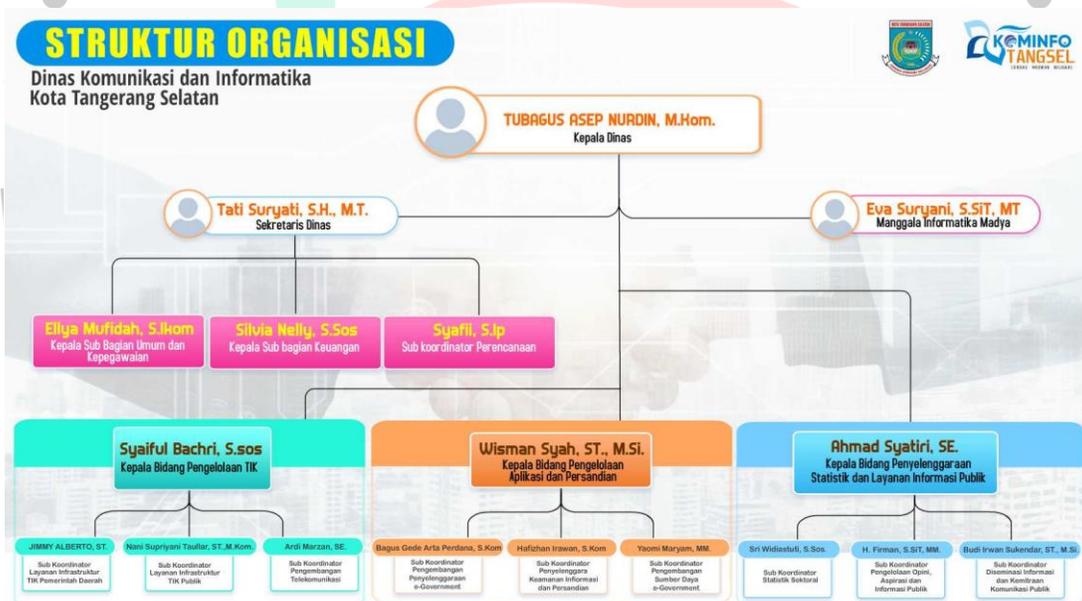
*Gambar 2. 1 KOMINFO TANGSEL*

Awalnya, ada masalah komunikasi dan informatika di kota Tangerang Selatan di bawah naungan Kementerian DISKOMINFO dan Informasi. Selain mengembangkan informasi yang lebih spesifik dan kebutuhan manajemen teknis, tugas dan fungsi dipisahkan. Hal ini ditentukan oleh struktur organisasi, tugas, fungsi dan prosedur kerja dari Kementerian Komunikasi dan informatika.

Struktur organisasi diciptakan untuk beradaptasi dengan dinamika pengembangan teknologi dan kebutuhan birokrasi yang lebih efisien. Perubahan ini diatur oleh Walikota Geran Selatan di bawah Peraturan No. 56 pada tahun 2022. Ini mendefinisikan lokasi, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan prosedur kerja untuk Dinas KOMINFO yang baru.

## 2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo dalam mengelola komunikasi dan informatika di Kota Tangerang Selatan.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi

### 2.2.1 Kepala Dinas

Kepala DISKOMINFO memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun dan menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Diskominfo. Kebijakan ini disusun sebagai pedoman strategis untuk memastikan arah kerja organisasi sesuai dengan visi dan misi pemerintah

daerah. Selain itu, Kepala Dinas juga berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dilakukan oleh bidang-bidang di bawahnya, sehingga tercipta sinkronisasi antar unit kerja. Tidak kalah penting, Kepala Dinas memastikan efektivitas pelaksanaan program kerja melalui proses evaluasi berkala, guna menjamin bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, anggaran, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

### **2.2.2 Sekretariat Dinas**

Sekretaris Dinas memiliki peran penting dalam mengelola administrasi dinas secara umum, yang mencakup pengelolaan surat-menyurat, arsip, tata usaha, serta urusan kepegawaian dan rumah tangga kantor. Tugas ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan administratif berjalan dengan tertib dan efisien. Selain itu, Sekretaris Dinas juga bertanggung jawab dalam menyusun anggaran, program kerja, dan laporan dinas. Penyusunan ini mencakup perencanaan kebutuhan anggaran tahunan, penyusunan rencana program kerja setiap bidang, serta pelaporan realisasi kegiatan dan keuangan yang menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan lebih lanjut oleh pimpinan.

### **2.2.3 Bidang Pengelolaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)**

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki tanggung jawab utama dalam mengembangkan dan mengelola infrastruktur TIK di lingkungan pemerintahan. Infrastruktur ini mencakup jaringan internet, server, perangkat keras, dan sistem pendukung lainnya yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintahan secara digital. Pengelolaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, hingga pengawasan, agar seluruh perangkat TIK dapat berfungsi optimal dan aman digunakan. Pengembangan infrastruktur TIK juga diarahkan untuk mendorong transformasi digital pemerintahan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta memperluas akses informasi bagi masyarakat.

### **2.2.4 Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Persandian**

Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Persandian memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai aplikasi yang digunakan oleh instansi pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola administrasi yang lebih efektif. Selain itu, bidang ini juga berperan penting dalam menjamin keamanan informasi melalui penerapan sistem persandian dan perlindungan data dari ancaman siber. Tidak hanya terbatas pada pengelolaan teknis, bidang ini turut mengembangkan serta memelihara platform e-Government yang menjadi sarana digitalisasi layanan kepada masyarakat, seperti layanan perizinan, informasi publik, dan pelaporan. Dengan pengelolaan yang baik, sistem e-Government diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### **2.2.5 Bidang Penyelenggaraan Statistik dan Layanan Informasi Publik**

Bidang Penyelenggaraan Statistik dan Layanan hubungan masyarakat bertanggung jawab dalam menyediakan data statistik sektoral yang akurat dan relevan guna mendukung perencanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Data ini dikumpulkan dari satu data Indonesia untuk memastikan keseragaman dan integrasi informasi. Selain itu, bidang ini juga mengelola komunikasi pemerintah publik dengan memberikan informasi yang target yang bermanfaat. Pengelolaan ini mencakup distribusi informasi tentang opini publik, media sosial pemerintah, serta penyebarluasan informasi melalui berbagai saluran komunikasi untuk membangun kepercayaan dan partisipasi aktif dari warga

### **2.3 Kegiatan Umum Perusahaan**

Diskominfo Kota Tangerang Selatan memainkan peran strategis sebagai instansi atau lembaga pemerintahan yang berfokus pada pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi. Kegiatan umum termasuk mengembangkan dan memelihara infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) termasuk jaringan internet, server, dan perangkat digital yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah. Selain itu, Diskominfo juga mengelola berbagai aplikasi pemerintahan yang mendukung pelayanan publik

berbasis digital, termasuk memastikan keamanan informasi melalui sistem persandian dan pengawasan terhadap potensi ancaman siber.

Sebagai instansi pemerintahan yang berfokus pada kegiatan umum Kementerian Komunikasi dan informatika (Diskominfo) kota Tangerang Selatan, terutama pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi:

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK

- Menyediakan jaringan internet, server, dan perangkat pendukung untuk seluruh perangkat daerah.
- Menjaga kestabilan jaringan dan keamanan sistem digital pemerintahan.

2. Pengelolaan Aplikasi dan Layanan Digital

- Mengembangkan dan memelihara aplikasi pemerintahan seperti e-Office, e-Lapor, dan sistem pelayanan masyarakat lainnya.
- Menguji dan mengevaluasi fungsionalitas aplikasi yang digunakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

3. Manajemen Keamanan Informasi dan Persandian

- Menjaga keamanan data dan informasi milik pemerintah daerah.

4. Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik

- Mengelola konten media sosial resmi Pemerintah Kota Tangsel.
- Menyampaikan informasi kebijakan dan program pemerintah secara aktif dan terbuka kepada masyarakat.

5. Pelayanan Informasi Publik dan Aduan Masyarakat

- Melayani permohonan informasi publik sesuai UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik).
- Menangani aduan masyarakat melalui kanal komunikasi resmi.